# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka, perlu dilandasi dengan sarana sistem penilaian kesehatan BUMN, yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.

Adapun lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jendral (Itjen) pada departemen-departemen pemerintah.

Sebagai lembaga negara tertinggi di bidang pengawasan keuangan, BPK bertanggung jawab mengaudit ratusan organisasi dengan berbagai ukuran dan kompleksitas bisnis. Antara lain pengelolaan keuangan pada Departemen, BUMN, BUMD, dan badan pemerintah lainnya di mana terdapat uang / harta milik negara. Khusus untuk BUMN, sebagian besar telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung operasinya. Jumlah BUMN yang diaudit BPK dalam tahun 1993-1995 rata-rata mencapai sekitar 80 BUMN per tahun dan ditangani oleh sekitar 120 auditor. Suatu penugasan audit umumnya dilakukan oleh satu tim beranggotakan tiga sampai enam orang auditor.

Berkaitan dengan audit sistem informasi, tahun 1995 dilakukan proyek uji coba audit sistem informasi terhadap empat BUMN sebagai penugasan khusus. Kemudian untuk rencana jangka panjang, BPK menetapkan bahwa terhadap

semua BUMN yang telah terkomputerisasi akan dilakukan *audit sistem informasi.*

Di samping audit atas laporan keuangan, pada masa sekarang auditor pemerintah sering melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas operasi berbagai program pemerintah dan BUMN. Dalam hal ini, para auditor dapat meninjau dan menganalisis segala aspek sistem komputerisasi tersebut, tetapi penekanan utamanya adalah pada penilaian terhadap kelayakan peralatan, efisiensi operasi, kecukupan, dan kegunaan keluaran, serta hal-hal lainnya guna melihat kemungkinan perolehan layanan yang sama dengan biaya yang lebih murah.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Seorang auditor harus memiliki latar belakang pendidikan formal *auditing* dan akuntansi, pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang akan ditekuninya, dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan lanjutan. Pada beberapa kasus yang timbul akhir-akhir ini terungkap bahwa seorang auditor dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang yang digeluti BUMN. Jika auditor atau asistennya tidak mampu menangani suatu masalah mereka wajib mengupayakan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dengan mengalihkan pekerjaannya kepada orang lain yang lebih mampu, atau mengundurkan diri dari penugasan.

Di BPK, hingga saat ini fungsi audit umumnya belum menggunakan teknologi informasi secara optimal, hal ini antara lain disebabkan karena kemampuan auditor yang kurang dalam mengaudit sistem informasi terhadap semua BUMN yang telah terkomputerisasi. Padahal untuk abad ini, teknologi informasi telah menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam perusahaan. Akibatnya pemanfaatan teknologi informasi di satu sisi memberikan andil bagi kelancaran operasi perusahaan, namun di sisi lain juga menimbulkan adanya masalah di bidang kendali dan keamanan. Selain itu waktu yang diperlukan dalam satu penugasan menjadi lama karena kemampuan auditor yang

berbeda-beda dan adanya tingkat kesalahan yang tinggi yang disebabkan karena pengerjaannya masih bersifat semi otomasi dan manual. Akibatnya penugasan audit hanya dapat mencakup sebagian kecil dari jumlah departemen, BUMN, BUMD, dan badan pemerintah lainnya yang ada.

Kondisi lain yang mempengaruhi kinerja Lembaga Audit Pemerintah tersebut antara lain adalah hanya sebagian kecil saja dari auditor yang mendapatkan pengetahuan informasi sistem secara memadai, antara obyek yang ditangani dengan kemampuan auditor tidak sebanding dalam arti kualitas dan kuantitas, fasilitas sistem informasi dan program audit yang belum tersosialisasi dengan merata ke seluruh auditor, sebagian besar obyek pemeriksaan belum berbasiskan komputer , dan budaya *konservatif* yang menghambat perubahan ke arah kemajuan dengan sistem informasi.

Salah satu alat bantu audit dalam hal melakukan *interogasi* atau pengujian atas *file* yang berisi data adalah *program audit command language* (ACL). Bagi para auditor, interogasi data merupakan bagian dari suatu proses audit. Auditor tidak perlu khawatir pada jenis-jenis *hardware,* dan *operating system* yang digunakan *client* karena yang diperlukan hanya datanya saja. Program ACL telah dirancang untuk dapat mengenali hampir semua jenis *file* data yang mungkin dapat ditemui di lapangan dan memiliki tingkat *independensi* yang tinggi terhadap *platform* yang digunakan program aplikasi *client*. Kendalanya adalah bagaimana caranya agar data yang dimiliki *client*, dengan kemungkinan jenis komputer *dan operating system* yang beragam, dapat dipindahkan ke komputer *desktop* yang dimiliki auditor agar dapat diuji dengan menggunakan program ACL yang ada pada komputer tersebut. Kendala lainnya adalah kemampuan auditor yang rendah dalam menggunakan alat bantu dalam hal ini adalah program ACL sehingga peranan program ACL dalam proses audit tidak maksimum dan bahkan dapat menjadi beban bagi pemakainya. Hal itu disebabkan tidak meratanya pelatihan yang diberikan pada auditor dan komputer yang kurang memenuhi standar untuk menjalankan program ACL.

Selain itu, kinerja perusahaan umumnya ditentukan oleh peranan karyawan perusahaan tersebut. Hal ini berlaku pula dalam Lembaga Audit Pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Audit Pemerintah antara lain kemampuan auditor, sistem informasi, pelatihan dan pendidikan khusus. Melihat adanya kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh kemampuan auditor dalam menggunakan *program Audit Command Language* terhadap peningkatan kinerja Lembaga Audit Pemerintah.

## 1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengelompokkan beberapa permasalahan yang muncul antara lain, yaitu :

- Kemampuan auditor rendah dalam hal penggunaan program Audit Command Language
- Kinerja Lembaga Audit Pemerintah yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah pengerjaan audit masih bersifat semi otomasi bahkan manual, kondisi area dan instansi yang diaudit oleh BPK belum seluruhnya terkomputerisasi.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi yang kurang memadai
- Pelatihan dan pendidikan yang tidak merata bagi auditor

Mengingat luasnya masalah yang ada, maka peneliti hanya membatasi penelitian pada pengaruh kemampuan auditor dalam menggunakan program Audit Command Language (ACL) terhadap peningkatan kinerja Lembaga Audit Pemerintah. Adapun Lembaga Audit Pemerintah yang akan diteliti adalah kantor BPK Pusat di DKI Jakarta yang diwakili oleh auditor sistem informasi BPK.

## 1.3. Perumusan Masalah

Adapun masalah utama yang akan diteliti dalam tesis ini adalah :

- Apakah ada pengaruh kemampuan auditor dalam menggunakan program Audit Command Language (ACL) terhadap peningkatan kinerja Lembaga Audit Pemerintah ?

## 1.4. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja Lembaga Audit Pemerintah Indonesia.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- Bagi Lembaga Audit Pemerintah (BPK)
  - Mengetahui faktor yang mempengaruh kinerja Lembaga Audit Pemerintah.
  - Dapat memberikan pelatihan tertentu yang berguna untuk meningkatkan kemampuan auditor.
  - Dapat membentuk tim yang beranggotakan auditor dengan kemampuan tinggi dan merata.
  - Dapat mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang auditor di abad ini.

- Bagi auditor sistem informasi pemerintah
  - Dapat mengetahui kemampuan yang dimilikinya.
  - Dapat meningkatkan kemampuan yang dimilikinya agar dapat meningkatkan kinerja Lembaga Audit Pemerintah.